



ANALISIS NORMATIF HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM AMERIKA, INGGRIS, DAN RUSIA

NORMATIVE ANALYSIS OF MARRIAGE LAW IN THE AMERICAN, BRITISH, AND RUSSIAN LEGAL SYSTEMS

Ester Vania Silalahi^{1*} Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: estervaniasilalahi12@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 02-11-2024

Abstract

In principle, marriage is a contract, to legalize the relationship and limit rights and obligations, please help between men and women. When viewed from a legal point of view, it is clear that marriage is a sacred and noble contract between a man and a woman whose purpose is to achieve a family of sakinah, mawadah and warohma and to support each other between the two both physically and mentally. Marriage is a union between a man and a woman recognized by the state for eternal union. According to Soetojo Prawirihamidjojo, marriage is a living communion between a man and a woman that is formally confirmed by law (juridical) and mostly religious. Meanwhile, according to Subekti, marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time. According to Kaelany H.D, marriage is a contract between prospective husband and wife to fulfill the wishes of their type according to what is regulated by sharia. With the contract, the two candidates will be allowed to get along as husband and wife. Each country certainly has a different marriage legal system, such as the laws and regulations that regulate marriage in Indonesia are pluralistic, because there are various laws that regulate marriage. so let us conduct a normative analysis of marriage in the legal system of Russia and Indonesia, because between the two there are differences that can add insight to all

Keywords: *American, British, and Russian marriage laws.*

Abstrak

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah dan warohma serta saling menyantuni antara keduanya secara lahir maupun batin. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Di setiap negara pastinya memiliki sistem hukum perkawinan yang berbeda- beda, seperti pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. maka izinkan kami melakukan analisis normatif



terhadap perkawinan dalam sistem hukum Rusia dengan Indonesia, karena diantara keduanya terdapat perbedaan yang dapat menambah wawasan bagi semua.

Kata Kunci: Hukum perkawinan Amerika, Inggris, dan Rusia.

PENDAHULUAN

Hukum tentang orang adalah bagian penting dalam sistem hukum suatu negara yang mengatur status, hak, dan kewajiban individu. Perlakuan hukum terhadap orang dapat bervariasi di antara negara-negara yang berbeda tergantung pada sistem hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga mempengaruhi struktur keluarga dan masyarakat. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengatur perkawinan, mencerminkan nilai-nilai budaya, agama, dan sejarahnya. Hukum perkawinan mengatur beberapa aspek.

Perkawinan sendiri dikenal dengan suatu ikatan sakral yang menyatukan secara sah antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan suami dan istri. Di setiap negara memiliki karakteristik perkawinan yang berbeda-beda. Sepasang lelaki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan tentu saja harus mengikuti segala persyaratan yang telah ditentukan oleh negara yang ditunggalinya.

Di setiap negara memiliki perjanjian kawin tersendiri, dimana perjanjian tersebut mesti dan wajib untuk dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, di luar perjanjian kawin itu ada juga pembatalan perkawinan yang dimana di setiap negara pun berbeda-beda, pembatalan perkawinan dilakukan agar tidak terjadinya pernikahan yang diakhiri dengan penyesalan, contoh kecil yang bisa menjadi pembatalan perkawinan adalah mempelai di bawah umur atau disebut anak-anak karena itu melanggar aturan hukum yang berlaku di negaranya tersebut.

Setelah terjadinya perkawinan dapat terjadi juga yang namanya putusan perkawinan atau yang kita kenal yaitu cerai, yang dimana hal ini dapat terjadi apabila terjadi kekejaman di dalam rumah tangga tersebut, contoh kecil yang bisa terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban diantaranya salah satu dari pasangan atau anak.

Perkawinan dikonstruksikan sebagai hubungan antara dua pihak, yaitu hubungan antara satu atau lebih laki-laki dengan satu atau lebih seorang wanita, dan adanya hak dan kewajiban dari suami istri tersebut. Dan atau perkawinan juga dapat dikonstruksikan sebagai kesepakatan sukarela, yaitu kesepakatan antara laki-laki dan wanita untuk mencapai maksud dan mereka harus cukup umur.

Prinsip utama dalam pernikahan adalah di landasinya dengan landasan filosofis dan yuridis tentang perkawinan, terlengkapinya persyaratan yang dilakukan pada saat ingin melangsungkan perkawinan, adanya sebuah perjanjian perkawinan, serta adanya perjanjian antara orang tua dan anak. Tentunya prinsip tersebut berbeda-beda di setiap negaranya, diantara negaranya memiliki ketentuan dan kebijakannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode analisis komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum,



serta artikel dan jurnal yang relevan dengan topik. Analisis di lakukan dengan cara membandingkan ketentuan hukum di Amerika, Inggris, dan di Rusia terikat dengan beberapa aspek kunci perkawinan, seperti persyaratan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perceraian(Dosen UBK).

PEMBAHASAN

1. Analisis Perkawinan Menurut Hukum Amerika.

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di kontruksikan sebagai hubungan yang sah antara seorang laki laki dengan seorang wanita sebagai suami istri, dan pasangan suami istri harus dari pasangan yang berbeda jenis kelaminnya bukan jenis yang sama(Funaro, 1991).

Namun kini di Amerika Serikat telah melegalkan hubungan yang sama jenis kelaminnya untuk melangsungkan perkawinan, seperti antara laki laki dengan laki laki dan wanita dengan Wanita(Black, 1978).

b. Landasan Filosofis dan Yuridis Tentang Perkawinan

Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perkawinan di Amerika Serikat, yaitu Family Code Amerika Serikat dan Defenge of Marriage Act 1986 HR 3396(Section 1. 101 Family Code).

Doma 1996 mengatur tentang penyempurnaan beeberapa pasal dalam United States Code, seperti misalnya, penyempurnaan pengertian marriage. Marriage dalam Doma ini dikonstruksikan sebagai hubungan yang sah antara laki laki dan wanita sebagai suami istri. Ini berarti yang dapat melangsungkan perkawinan hanya laki laki dan wanita bukan antara laki laki dengan laki laki atau wanita dengan wanita.

c. Syarat Syarat Sah nya Perkawinan

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan di dalam sistem hukum Amerika Serikat telah ditentukan dalam Sec. 2.001 sampai dengan 2.405 Family Code. Pesyaratan untuk kawin di bedakan menjadi dua, yaitu(Sec 2. 102 Family Code. Parental Consent For Underage Applicant):

- 1) Validity of Marriage dan
- 2) Formalities of Marriage(Sec 1. 104 Family Code)

Apabila calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan kurang dari umur yang di tentukan, maka yang bersangkutan harus meminta persetujuan dari orang tuanya. Between close relatives merupakan perkawinan yang di larang karena adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara satu dengan yang lainnya. Formalities of marriage merupakan persyaratan yang berkaitan dengan pengumuman untuk melangsungkan perkawinan(Sec. 2. 102 huruf a Family Code Amerika Serikat).

d. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin atau premarital agreetment diatur dalam Sec. 4.001 sampai dengan Sec. 4.004 Family Code Amerika Serikat. Premarital agreetment merupakan perjanjian kawin yang dibuat antara pasangan suami istri berdasarkan hasil renungan, kebulatan pikiran dan



perhatian dari kedua belah pihak dan berlaku setelah dilangsungkannya perkawinan. Bentuk perjanjian perkawinan, yaitu:

- 1) Tertulis, dan
- 2) Ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hal hal yang dapat dimuat dalam perjanjian kawin yaitu hak dan kewajiban dari salah satu pihak atas harta bendanya yang di peroleh, kapan atau dimana benda itu diperoleh(Sec. 4. 001 ayat (1) Family Code).

e. Hak dan Kewajiban antara Orang tua Dengan Anak

Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan orang tua dan anak yang meliputi:

- 1) Hak untuk memiliki secara fisik
- 2) Merawat, mengawasi, melindungi si anak
- 3) Mendukung anak
- 4) Wali untuk mengelola harta anak sebagai agen negara
- 5) Hak untuk menyetujui pernikahan anak
- 6) Hak untuk mewakili anak dalam tindakan hukum dan membuat putusan lain
- 7) Hak untuk menerima dan memberikan tanda terima untuk pembayaran dukungan dari anak
- 8) Hak untuk mewarisi dari dan melalui anak(Sec. 4. 002 The Family Code)
- 9) Hak untuk membuat keputusan untuk pendidikan anak
- 10) Hak atau tugas lain antara orang tua dengan anak berdasarkan hukum

f. Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Ameirka

Di dalam sistem hukum Amerika, pembatalan perkawinan disebut dengan Annulment. Annulment merupakan proses dimana pengadilan Amerika Serikat dapat mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan menyebutkan alasan alasan yang dapat diajukan pembatalan perkawinan kepada Court. Kesembilan alasan itu meliputi:

- 1) Annulment of marriage of person under age 18
- 2) Underage annulemnt barred by adulthood
- 3) Discretionary annulment od underage marriage
- 4) Impotency
- 5) Fraud, dures, of force
- 6) Mental incapacity
- 7) Concealed divorce
- 8) Marriage less than 72 hours after insuance of license and
- 9) Death of party to voidable marriage

Pengajuan pembatalan perkawinan diajukan dalam waktu 90 hari, sejak hari perkawinan(Sec. 151. 001. Rights and Duties of Parent).

g. Putusnya Perkawinan dalam Sistem Hukum Amerika

Pembubaran atau putusnya perkawinan diatur dalam Section 6.001 sampai dengan Secion 6.007 Family Code Amerika Serikat. Pengadilan baru memutuskan pembubaran



perkawinan apabila memenuhi alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak kepada pengadilan. Ketujuh alasan meliputi:

- 1) Insupportability
- 2) Cruelty
- 3) Adultery
- 4) Conviction of felony
- 5) Abandonment
- 6) Living apart and
- 7) Confinement in mental hospital(Subtitel C Family Code)

Ketujuh alasan itu, bukan alasan kumulatif, tetapi dengan satu alasan saja sudah cukup bagi salah satu pasangan itu untuk mengajukan gugatan ke Court, namun apabila permohonan gugatan itu dikabulkan oleh Court, maka ada tiga konsekuensi yang muncul yaitu:

- a) Pembagian harta bersama
- b) Pengaturan hak asuh anak dan
- c) Pemberian biaya hidup bagi si anak dan bekas istrinya

2. Analisis Perkawinan Menurut Hukum Inggris.

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah kesatuan sosial atau kontrak hukum antara orang-orang yang disebut sebagai pasangan yang menetapkan hak dan kewajiban antara suami-istri, antara suami-istri dan anak-anak mereka dan antara suami-istri dan mertua mereka (Havilan et al, 2011).

Dalam definisi ini, asas perkawinan yang dianut yaitu asas poligami atau poliandri. Poligami diartikan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu. Begitu juga sebaliknya, istri dapat kawin dengan satu atau lebih laki-laki.

b. Landasan Yuridis Tentang Perkawinan

Di Inggris telah menetapkan delapan act atau Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Kedelapan act itu adalah (Duran Bell, (1997)):

- 1) Marriage Act, 1949
- 2) Marriage Regulations, 1963
- 3) Family Law Reform Act, 1969
- 4) The Marriage Act, 1983
- 5) Family Law Act, 1996
- 6) Forced Marriage Act, 2007
- 7) Church of England Marriage Measure 2012
- 8) Marriage Act 2013

c. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan dalam Sistem Hukum

Syarat-sahnya perkawinan telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan yang meliputi (Section 17 ayat (1) Marriage Act, 1949):

- 1) Marriage Act, 1949
- 2) Marriage Regulations, 1963



3) Family Law Reform Act, 1969

4) The Marriage Act, 1983

5) Family Law Act, 1996

Syarat pokok untuk melangsungkan perkawinan meliputi:

- a) Para pihak yang melangsungkan perkawinan harus dari lawan jenis yang berbeda, yaitu laki laki dan perempuan
- b) Telah berusia 18 tahun
- c) Calon pasangan suami tidak terikat dalam keluarga terdekat
- d) Bagi calon pasangan suami yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tuanya atau walinya
- e) Disaksikan dua orang petugas, yaitu notaris atau konsuler(Section 1 ayat (1) Family Law Marriage Act 1949)

d. Perjanjian Perkawinan

Hal hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan, yaitu:

- 1) Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan memiliki properti
- 2) Utang selama perkawinan
- 3) Hal hal yang berkaitan dengan keuangan, jika hubungan perkawinan diantara pasangan suami istri berakhir
- 4) Perawatan anak setelah perkawinannya putus

Subjek perjanjian:

1. Calon pasangan yang hidup bersama
2. Berencana hidup bersama
3. Berharap hidup bersama

Objek perjanjian:

1. Perjanjian kohabitasi berbicara tentang siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan memiliki properti
2. Utang selama hidup bersama
3. Isu isu keuangan akan ditangani jika hubungan bersama putus
4. Perawatan anak setelah hidup bersama putus

e. Hak dan Kewajiban antara Orang tua Dengan Anak

Hak dan kewajiban orang tua dengan anak ditentukan dalam Undang Undang anak yaitu Children Act 1989. Hak orang tua terhadap anaknya yaitu(Pasal 3 ayat (1) Children Act 1989):

- 1) Hak wali untuk memulihkan namanya untuk memulihkan anaknya
- 2) Hak untuk mengurus hartanya

Kewajiban hukum orang tua terhadap anaknya yaitu:

1. Menjaga anak anaknya
2. Mengurus kematiannya
3. Merawat anak anaknya



Tujuan dari pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak anaknya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anak(Anonim, parental Responsibility, 2009).

f. Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Inggris

Syarat syarat terjadinya pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Pihak pihak dilarang untuk melangsumgkan perkawinan karena kedekatan hubungan
- 2) Salah satu pihak berada di bawah usia enam belas tahun
- 3) Para pihak telah meikah dengan mengabaikan persyaratan tertentu untuk pembentukan perkawinan
- 4) Pada saat pernikahan salah satu pihak sudah sah menikah
- 5) Para pihak bukan masing masing pria dan wanita
- 6) Salah satu pihak pada saat pernikahan tidak berdomisili di Inggris
- 7) Ketidakmampuan salah satu pihak dalam melaksanakan perkawinan
- 8) Perkawinan belum disempurnakan karena penolakan disengaja responden untuk mewujudkan hal itu
- 9) Perkawinan yang didasarkan pada paksaan, kesalahan, dan tidak sehat mentalnya
- 10) Pada saat pernikahan salah satu pihak menderita sakit jiwa
- 11) Pada saat pernikahan responden adalah penderita penyakit kelamin
- 12) Pada saat pernikahan, salah satu pihak telah dihamili oleh beberapa orang lain selain pemohon

g. Putusnya Perkawinan dalam Sistem Hukum Inggris

Dalam pasal 1 ayat 2 Matrimonial Causes Act 1973 telah diatur beberapa alasan dapat terjadi putusnya perkawinan di Inggris, yaitu(Pasal (1) ayat (1) Matrimonial Causes Act 1973):

- 1) Salah satu pihak telah melakukan perzinahan
- 2) Salah satu pihak berperilaku buruk
- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu minimal dua tahun sebelum gugatan diajukan
- 4) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama lima tahun
- 5) Apabila salah satu alasan itu sudah terpenuhi maka sudah dapat dianggap cukup oleh pengadilan

3. Analisis Perkawinan Menurut Hukum Rusia.

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di konsepkan sebagai kesepakatan sukarela, kesepakatan yang dibuat antara laki laki dan wanita dengan tujuan untuk memasuki perkawinan dan untuk mencapai maksud dan mereka harus cukup umur.

b. Landasan Filosofis dan Yuridis Tentang Perkawinan

Secara filosofis tujuan pembentukan undang undang ini adalah dalam rangka mengonsolidasikan keluarga untuk membangun hubungan keluarga, saling mencintai dan saling menghormati, bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga dan



diterimanya semua anggota keluarga dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Didalam landasan filosofis ini terdiri dari 8 seksi yang meliputi(Pasal 1 ayat (1) The Family Code of The Russian Federation Nomor 223 tahun 1995):

- 1) General provisions
- 2) Marriage and divorce
- 3) The right and duties of spouses
- 4) The right and duties of parents and children
- 5) Alimony duties of family members
- 6) Way of raising children who are not under parental care
- 7) Application of family law to family relationship that include foreign citizens and stateless person and
- 8) Concluding remarks

c. Syarat Syarat Sah nya Perkawinan

Prosedur yang harus di ditempuh oleh calon pasangan suami istri yang akan menikah adalah:

- 1) Mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan pada kantor catatan sipil
- 2) Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah satu bulan dari tanggal pengajuan permohonan(Pasal 10 dan pasal 11 The Family Code of The Russian federation Nomor 223 Tahun)

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami dan istri adalah:

1. Ada persetujuan secara sukarela antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan
2. Telah mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni 18 tahun untuk kedua belah pihak
3. Apabila calon pasangan belum berumur 18 tahun maka harus mendapat izin dari orang tuanya masing masing
4. Sehat jasmani dan Rohani

d. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian merupakan perjanjian yang dibuat oleh orang orang yang akan melangsungkan perkawinan atau pasangan suami istri yang berkaitan dengan pengaturan harta benda mereka didalam perkawinan atau pada saat terjadi pembubaran perkawinan, Perjanjian ini dibuat oleh notaris dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat di tandatangani:

- 1) Sebelum pendaftaran perkawinan
- 2) Saat sebelum perkawinan

e. Hak dan Kewajiban antara Orang tua Dan Anak

Hak seorang anak yang diatur didalam Undang Undang perkawinan Rusia pasal 54 - 60 meliputi(Pasal 40 The Family Code of The Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995):

- 1) Diakui sebagai seorang anak sampai anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun
- 2) Hak untuk hidup



- 3) Hak untuk mengetahui orang tuanya
- 4) Hak untuk hidup dengan orang tuanya
- 5) Hak untuk menikmati perawatan mereka

Kewajiban orangtua meliputi:

1. Wajib membesarkan anaknya sampai dengan dewasa
2. Bertanggung jawab atas pendidikan dan perkembangan anak anaknya
3. Wajib menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual dan moral anak anaknya
4. Wajib menyekolahkan anak anaknya
5. Wajib memberikan perlindungan kepada anak anaknya(Pasal 61 The Family Code of The Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995)

f. Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Rusia

Pembatalan perkawinan di tentukan dalam pasal 27 dan 28, pembatalan dapat terjadi apabila:

- 1) Perkawinan yang terjadi tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami istri
- 2) Para pihak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan
- 3) Salah satu pihak tidak memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan

Orang yang berhak meminta pembatalan perkawinan adalah:

1. Orang tuanya
2. Walinya
3. Jaksa penuntut umum(Pasal 28 The Family Code of The Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995)

g. Putusnya Perkawinan dalam Sistem Hukum Rusia

Alasan untuk mengakhiri perkawinan, yaitu:

- 1) Meninggalnya salah satu pasangan
- 2) Adanya permohonan perceraian dari salah satu atau kedua pasangan suami istri
- 3) Pasangan suami istri tidak mempunyai anak
- 4) Salah satu pihak dinyatakan hilang oleh pengadilan
- 5) Salah satu pihak dinyatakan tidak mampu oleh pengadilan(Pasal 16 ayat (1) The Family Code of The Russian federation Nommor 223 Tahun 1995)

Pengadilan juga membatasi hak suami untuk mengakhiri pembatalan, apabila:

1. Istrinya dalam keadaan hamil
2. Umur anak yang baru dilahirkan belum mencapai satu tahun(Pasal 16 ayat (2) The Family Code of The Russian federation Nommor 223 Tahun 1995)



KESIMPULAN

Hukum perkawinan di Amerika, Inggris, dan Rusia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan dan pengakuan status serta hak-hak individu. Di Amerika, hukum perkawinan bervariasi antara negara bagian karena sistem federalisme, tetapi ada prinsip umum seperti usia minimum untuk menikah tanpa izin orang tua adalah 18 tahun, persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, kapasitas mental yang memadai, status lajang, dan larangan hubungan darah dekat. Pasangan harus mendapatkan lisensi perkawinan sebelum menikah, dan hak asuh anak setelah perceraian diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Hukum perkawinan di Inggris diatur oleh berbagai undang-undang yang telah berkembang selama berabad-abad. Usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun, dengan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak dan status lajang. Perkawinan dapat dilakukan di gereja, kantor catatan sipil, atau tempat lain yang disetujui. Setelah menikah, pasangan memiliki hak atas properti bersama, hak asuh bersama, dan kewajiban finansial yang mendukung. Perceraian memerlukan bukti bahwa pernikahan tidak dapat diperbaiki, dan pasangan sesama jenis dapat menikah sejak marriage (same sex couples) Act 2013.

Hukum perkawinan di Rusia memiliki peraturan perkawinan tersendiri, syarat sah dari perkawinan di Rusia diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15 Nomor 223 tahun 1995. Perjanjian perkawinan di Rusia dapat dilakukan sebelum pendaftaran atau sebelum perkawinan dengan hak dan kewajiban yang diatur juga. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. H. Salim HS., SH., M.S., Erlies Septiana Nurbani, SH., LMM. Perbandingan Hukum Perdata comparative civil law. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

The Family Code of the Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995

Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974